



## FALSAFAH SERAT SASTRA GENDHING SEBAGAI BASIS KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN

---

### *Philosophy of Serat Sastra Gendhing as a Basis For Educational Leadership*

**Zubdatul Itqon**

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

[zubdatulitqon@gmail.com](mailto:zubdatulitqon@gmail.com)

**Mahrus**

STAI Nahdlatul Ulama (STAINU) Malang

[mahrus283@gmail.com](mailto:mahrus283@gmail.com)

#### **Abstract**

*Leadership is a form of art and culture in educational institutions. Leadership practices that tend to adopt leadership styles from the West have developed in the current era of globalization. Like a pearl buried by civilization and developments over time, the use of theories from outside seems to be increasingly sinking the existence of Javanese philosophy. Exploring Javanese leadership philosophy is an effort to revive a leadership philosophy based on local wisdom. It could be that the current leaders have jumped too far from their essential position. Serat Sastra Gendhing is a leadership philosophy that contains seven main mandates that can be upheld by a leader. Mastery of these seven characteristics is a characteristic of ideal leadership. This article was prepared based on library research, because it uses books as a data source. The data collection method is documentation. Meanwhile, the analysis method is content analysis. Serat Sastra Gendhing teaches the need for a leader to have social-spiritual intelligence, defend truth and justice, the ability to develop culture and be a pioneer of science.*

Kepemimpinan merupakan bentuk kesenian dan kebudayaan dalam tatanan lembaga pendidikan. Praktik kepemimpinan yang cenderung mengadopsi gaya kepemimpinan dari Barat berkembang pada era globalisasi saat ini. Ibarat mutiara yang terkubur oleh peradaban dan perkembangan masa, penggunaan teori-teori dari luar nampaknya semakin menenggelamkan eksistensi falsafah Jawa. Penggalian falsafah kepemimpinan Jawa merupakan upaya untuk mengangkat kembali falsafah kepemimpinan berbasis kearifan

lokal. Bisa jadi pemimpin yang ada saat ini telah melompat terlalu jauh dari pijakan esensinya. Serat Sastra Gendhing merupakan falsafah kepemimpinan yang berisi tujuh amanah utama yang dapat dipegang oleh seorang pemimpin. Penguasaan tujuh karakteristik tersebut merupakan ciri kepemimpinan yang ideal. Artikel ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan, karena menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Metode pengumpulan datanya adalah dokumentasi. Sedangkan metode analisisnya adalah analisis isi. Serat Sastra Gendhing mengajarkan perlunya seorang pemimpin memiliki kecerdasan sosial-spiritual, membela kebenaran dan keadilan, kemampuan mengembangkan budaya dan pelopor ilmu pengetahuan.

**Kata Kunci:** Falsafah, Serat Sastra Gendhing, Kepemimpinan Pendidikan.

#### A. PENDAHULUAN

Ciri pemimpin yang kompeten di era globalisasi sekarang adalah mampu melakukan perbaikan secara terus menerus, tidak mudah puas dengan kinerjanya dan tidak sekadar mempertahankan *status quo*. Kinerja kepemimpinan seperti ini hanya dapat dilakukan oleh pemimpin yang dilandasi keluwesan, visioner, kerja sama yang baik dan dapat dipercaya oleh seluruh anggota organisasinya dalam mencapai tujuan bersama. Pemimpin seperti inilah yang mampu eksis seiring perkembangan zaman, meskipun dihadapkan berbagai permasalahan.

Pemimpin harus bijaksana dan cermat dalam setiap langkah atau mengambil keputusan. Hal ini tentu berlaku bagi pemimpin pendidikan yang memegang otoritas tertinggi di sebuah lembaga pendidikan. Pemimpin memiliki tugas untuk meningkatkan mutu lembaga yang dipimpinnya dan mendorong serta mendukung seluruh anggota yang terlibat dalam peningkatan mutu tersebut. Menjadi pemimpin ideal bukan hal yang mudah, karena harus memiliki dan menguasai falsafah kepemimpinan dari berbagai literatur atau pendapat pemimpin yang memegang erat falsafah kepemimpinan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.

Permasalahan yang terjadi adalah maraknya praktik kepemimpinan yang mengadopsi model kepemimpinan dari luar, seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang, sehingga perlu adanya reinterpretasi dan adaptasi agar relevan dengan kebudayaan lokal, karena kepemimpinan merupakan bentuk kebudayaan dalam tatanan masyarakat. Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, tindakan maupun hasil karya manusia. Kepemimpinan memiliki warna tersendiri dalam kebudayaan, karena kebudayaan adalah proses interaksi antar manusia. Interaksi dalam hal ini dipenuhi dengan orientasi dan nilai-nilai yang diharapkan oleh pemimpin (Endraswara, 2013).

Tanah Air Indonesia sekarang ini nampaknya cenderung meniru gaya kepemimpinan Eropa dan Amerika Serikat. Sedangkan gaya kepemimpinan yang diwariskan leluhur sendiri (raja, tokoh masyarakat, tokoh agama, satrawan) sudah banyak yang mengabaikan dan melupakan. Sesungguhnya ajaran yang diwariskan leluhur tersebut memiliki ajaran yang bermoral, yang dapat membentuk watak dan kepribadian pemimpin jika dikaji dan diterapkan kembali (Kartono, 2016)

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kita sebenarnya memiliki warisan leluhur yang adiluhung (mulia), yang diajarkan nenek moyang dalam karya sastra yang kaya akan nilai teladan, baik secara eksplisit maupun implisit.

Artikel ini bukan bermaksud menginferiorikan teori-teori kepemimpinan dari luar, melainkan berusaha untuk mengangkat kembali falsafah Jawa sebagai sebuah kebudayaan dan kearifan lokal dari konsepsi kepemimpinan yang multivarian. Di sini, penulis mencoba membahas dan memperkenalkan falsafah kepemimpinan Jawa serta relevansinya dengan kepemimpinan pendidikan, berdasarkan analisis terhadap Serat Sastra Gendhing.

## **B. METODE**

Artikel ini disusun berdasarkan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber data (Hadi, 1990). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Sedangkan metode analisisnya adalah analisis isi (*content analysis*). Yaitu analisis ilmiah yang menekankan pada isi atau pesan yang dibangun secara objektif dan sistematis. Dengan analisis isi, diharapkan akan menghasilkan pemahaman yang mendalam serta objektif tentang falsafah Serat Sastra Gendhing sebagai basis kepemimpinan pendidikan, sesuai dengan falsafah kepemimpinan budaya Jawa.

## **C. HASIL DAN DISKUSI**

### **1. Kepemimpinan Pendidikan**

Ibarat garam dengan rasa asinnya, kepemimpinan dan kekuasaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kepemimpinan mampu menggerakkan seluruh bagian organisasi sekaligus pemilik mutlak atas kekuasaan dan kebijakan.

Kepemimpinan merupakan suatu bentuk dominasi yang berdasarkan kapabilitas/kemampuan pribadi, yakni mampu mengajak dan mengarahkan orang lain untuk bekerja untuk mencapai tujuan bersama (Mulyono, 2009). Pemimpin menjadi tokoh sentral yang menentukan apakah organisasinya mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kepemimpinan menjadi faktor penentu atas keberhasilan organisasi/lembaga pendidikan.

Mulyono mendefinisikan kepemimpinan sebagai usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi bawahannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan, melalui komunikasi (Mulyono, 2009). Definisi tersebut menunjukkan tiga implikasi penting dalam kepemimpinan. *Pertama*, adanya proses interaksi antara pemimpin dan anggotanya sebagai proses penggunaan pengaruh. Interaksi ini menunjukkan distribusi tidak merata. Artinya, ada perbedaan status antara pemimpin sebagai pemberi pengaruh dengan anggota sebagai yang dipengaruhi. Proses mempengaruhi menggambarkan bahwa pemimpin bertugas memotivasi, mengarahkan, mengubah, menyuruh, bahkan berhak memberikan hukuman (jika diperlukan) kepada anggotanya, dalam rangka mencapai tujuan. *Kedua*, proses mempengaruhi tersebut harus sampai dan dapat diterima oleh anggotanya. Agar hal ini dapat tercapai, maka diperlukan komunikasi yang tepat dan jelas. *Ketiga*, kejelasan tujuan serta kemampuan pengorganisasian untuk mencapai tujuan.

Kepemimpinan bukan hanya sebatas memegang otoritas formal yang terlegitimasi dalam sebuah organisasi. Lebih dari itu, kepemimpinan merupakan sebuah proses. Artinya, seorang pemimpin dengan otoritasnya mampu mendorong proses perubahan ke arah yang lebih baik secara terus menerus. Konsep relasi dalam kepemimpinan secara implisit memberi premis bahwa pemimpin yang baik mampu menginspirasi para anggotanya dengan berbagai cara (Mulyono, 2009).

Dalam teori Barat, seorang pemimpin mempunyai ciri-ciri fisik, mental, dan kepribadian. Menurut Stogdill, karakteristik fisik dan kepribadian pemimpin mencakup antara lain: ciri fisik seperti energi, penampilan dan tinggi badan; empat ciri kecerdasan dan kemampuan; empat ciri kepribadian (adaptabilitas, agresivitas, antusiasme, keyakinan diri); tiga karakter terkait tugas (dorongan berprestasi, ketekunan, inisiatif) dan tiga karakter sosial (kerjasama, kemampuan antar pribadi, kemampuan administratif) (Wehrich, 1996).

Menurut Bartol *et al*, sifat yang harus dimiliki pemimpin adalah: a) sifat fisik (tinggi, berat, penampilan, berenergi); b) kepribadian (kekuasaan, mementingkan atas hal-hal lahir, original); c) *skill* dan kemampuan (IQ, pengetahuan, kompetensi teknis); d) faktor sosial (ketrampilan personal, keramahan, tingkat sosial ekonomi) (Kathryn M. Bartol, 2002). Lord, De Vader & Allinger mengidentifikasi beberapa sifat asli seorang pemimpin adalah: IQ, kekuasaan, sikap agresif, dan tegas. Bray, Campbell & Grant menyebutkan bahwa sifat yang perlu dimiliki oleh pemimpin adalah: komunikasi dan keterampilan hubungan manusia secara lisan, kebutuhan atau motivasi untuk maju, tahan terhadap stres, toleransi terhadap ketidakpastian, energi, dan kreativitas manajerial dalam memprediksi kemajuan.

Ketrampilan yang harus dimiliki pemimpin menurut Makawimbang adalah: a) keterampilan dalam memimpin, b) keterampilan dalam hubungan insani, c)

keterampilan dalam proses kelompok, d) keterampilan dalam administrasi personil, dan e) keterampilan dalam menilai (Makawimbang, 2012).

Berdasarkan penjelasan di atas, kepemimpinan adalah kemampuan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja. Maka, kepemimpinan pendidikan pun memiliki makna yang tidak jauh berbeda. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan mempengaruhi, mengkoordinir dan menggerakkan seluruh anggota yang terlibat dalam pendidikan, agar proses pendidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan pendidikan (Mulyadi, 2010).

Pemimpin pendidikan bertanggungjawab terhadap seluruh kelangsungan dan keberhasilan fungsi dan kegiatan pendidikan. Secara analitis, tugas kepemimpinan pendidikan terbagai dalam dua kategori: bidang manajemen atau administrasi; dan bidang pendidikan atau pengajaran (Makawimbang, 2012).

Untuk menghadapi tantangan yang besar, pemimpin harus memiliki kesiapan yang memadai. Praktik kepemimpinan juga memiliki prinsip esensial yang bersifat filosofis. Oleh karena itu, kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dengan dimensi filosofis seperti falsafah kepemimpinan. Karena falsafah kepemimpinan berfungsi sebagai fondasi yang kokoh dalam setiap tindakan atau kebijakan pemimpin.

## **2. Falsafah Kepemimpinan Jawa**

*Jaman edan* merupakan istilah dimana pemimpin dengan kekuasaannya berlaku sewenang-wenang menggunakan segala cara untuk melanggengkan statusnya sebagai pemimpin dan meraih keuntungan pribadi. Ini contoh pemimpin yang tidak memiliki pegangan yang kuat sebagai dasar setiap tindakannya. Seorang pemimpin hendaknya tidak hanyut dalam arus *jaman edan* seperti arus banjir di musim hujan yang begitu derasnya.

Perihal kepemimpinan dan landasannya, Jawa memiliki peradaban tinggi karena memiliki nilai budaya adiluhung (mulia) yang tak pernah lekang oleh zaman. Falsafah Jawa sebagai kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai adiluhung haruslah terus dijaga serta dibina, guna memperkuat penghayatan dan pengamalan nilai luhur budaya bangsa, meningkatkan kualitas hidup, mempertegas jati diri bangsa, menjadi kebanggaan nasional, serta menjadi penggerak dalam mencapai cita-cita bersama (Febri, 2019).

Seiring perkembangan IPTEK yang begitu pesat dan keberagaman suku yang saling berbaur di nIndonesia, falsafah Jawa tidak sepekat seperti dahulu. Falsafah Jawa tidak begitu populer di telinga masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat Jawa sendiri. Meskipun, falsafah Jawa merupakan dasar pijakan dan bekal dalam menjalankan tugas serta tanggungjawab seorang pemimpin.

Jawa yang dimaksud dalam artikel ini bukanlah Jawa secara letak geografis sebagai orang yang tinggal di pulau Jawa, atau orang Jawa secara etnis. Jawa yang

dimaksud adalah seseorang yang memiliki jiwa Jawi, yang berarti orang yang menginternalisasikan prinsip ke-Jawa-an dalam laku kehidupannya (Achmad, 2013).

Jadi, falsafah Jawa adalah pandangan filosofis dari seorang pemimpin yang berusaha mewujudkan tujuan bersama (pemimpin dan yang dipimpin) yang telah disepakati sebelumnya dengan melandaskan kebijakannya dengan kecintaan serta berorientasi pada prinsip ke-Jawa-an.

Kebudayaan Jawa memiliki kearifan lokal yang cukup kental dalam bidang kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hal yang mendapat perhatian tinggi, karena terikat dengan nilai-nilai ideal yang tidak hanya berorientasi pada dunia semata. Asumsi ini dapat dilihat dari pandangan tradisional yang menganggap pemimpin sebagai penguasa sekaligus “titisan/wakil” dewa (wakil Tuhan). Sakralitas ini memberi tanggungjawab yang besar untuk menciptakan keharmonisan antara manusia, alam dan Tuhan.

Sumber kekuasaan dapat berupa status atau kedudukan. Artinya, seorang pemimpin pendidikan berhak memberi hukuman kepada anggota yang melanggar disiplin kerja, atau memberi teguran jika tidak dapat memenuhi spesifikasi tentang standar yang ditentukan. Sumber kekuasaan lainnya adalah intelektual atau keterampilan. Artinya, pemimpin pendidikan memiliki kemampuan dan keahlian agar dapat dimanfaatkan untuk memperoleh reputasi dalam lembaga pendidikan (Endraswara, 2013).

Jika identitas pemimpin tidak dikelola dengan baik berdasarkan religiusitas, pengetahuan dan kemampuan, maka tidak menutup kemungkinan yang muncul adalah egoisme. Misalnya pemimpin yang hanya memanfaatkan statusnya saja, akan menimbulkan dominasi kekuasaan yang ekstrem dari penggunaan otoritas terhadap kinerja anggotanya. Sumber kekuasaan di atas merupakan embrio yang kemudian dikembangkan kembali dalam pembentukan falsafah kepemimpinan.

Definisi falsafah adalah gagasan dan landasan seseorang atau masyarakat; pandangan hidup. Berfalsafah berarti memikirkan secara mendalam terkait suatu hal; menguak pemikiran yang mendasar, yang kemudian dijadikan pandangan hidup (Departemen Pendidikan Nasional, 2008).

Sebagai peradaban yang besar, Jawa memiliki beragam falsafah yang tersebar dalam dimensi-dimensi kehidupan, seperti dalam etika pergaulan, relasi orangtua dan anak, hubungan sosial, religiusitas, pendidikan, hukum, dan lain-lain. Di antara falsafah tersebut, falsafah kepemimpinan adalah yang paling menonjol di kalangan masyarakat. Tidak mengherankan, karena sejak zaman dahulu, masyarakat Jawa memiliki dominasi kepemimpinan yang cukup besar. Para pemimpin Jawa sering menggunakan falsafah sebagai pedoman kepemimpinannya (Santoso, 2010).

### 3. Serat Sastra Gendhing sebagai Falsafah Kepemimpinan Jawa dan Relevansinya dengan Kepemimpinan Pendidikan

Pembahasan tentang falsafah hampir tidak terdengar kembali dalam dunia administrasi, tak terkecuali dalam administrasi pendidikan. Pembahasan falsafah kepemimpinan nampaknya kurang menarik untuk diperbincangkan, dibandingkan dengan pembahasan yang berkaitan dengan keuntungan (laba). Dalam praktik kepemimpinan sekarang ini, pendekatan pragmatis-kapitalis seolah lebih membumi dan dianggap lebih utama dibandingkan filosofis-utopis. Utopis di sini bukan berarti khayalan semu, tetapi lebih kepada pandangan ke arah masa depan tanpa meninggalkan falsafah-falsafah yang ada sejak dahulu.

Kepemimpinan dalam pendidikan merupakan syarat utama dalam sebuah lembaga pendidikan. Seorang pemimpin haruslah mampu menjalankan tugasnya, serta mempunyai arah dan tujuan sesuai dengan lembaga yang dipimpinnya. Seorang pemimpin seolah mempunyai beban yang berat. Di satu sisi ia harus menanggung berbagai permasalahan yang ada, dan di lain sisi ia harus mampu mengatasi berbagai permasalahan tersebut.

Memahami secara mendalam dan menerapkan konsep manajemen atau administrasi merupakan tuntutan yang harus dikuasai oleh pemimpin pendidikan. Falsafah merupakan cara berfikir yang sesuai dengan anggota organisasi, *stakeholder*, nilai dan keyakinan yang melandasi setiap tindakan pemimpin. Falsafah menjadi dasar untuk membentuk asumsi, yang kemudian menjadi sebuah prinsip yang berkaitan dengan kerangka untuk bertindak. Teori manajemen membantu pemimpin organisasi pendidikan dalam memecahkan berbagai permasalahan. Konsep dasar manajemen pendidikan inilah yang harus dipahami serta diaplikasikan oleh pemimpin pendidikan (Mulyono, 2009).

Selama beberapa tahun terakhir, telah banyak penggunaan teori-teori Barat yang dijadikan instrumen kepemimpinan dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tak jarang para ilmuwan dan pemimpin lebih banyak menggunakan buku-buku kepemimpinan ala Barat sebagai sumber referensi utama, dan kurang memperhatikan literatur lokal. Sebenarnya, jauh sebelum muncul literatur-literatur tentang kepemimpinan kontemporer, budaya Jawa sudah memiliki konsep kepemimpinannya sendiri.

Alat ukur kepemimpinan yang umum digunakan adalah berbasis *general psychology* (psikologi umum) yang berkembang di Barat. *General psychology* berusaha menggunakan prinsip-prinsip yang diterapkan dalam masyarakat umum. Pendekatan ini berasumsi bahwa suatu teori atau prinsip itu bersifat universal.

Memang benar bahwa konsepsi kepemimpinan Barat sifatnya umum untuk semua konteks. Akan tetapi, penerapan pada konteks yang berbeda, tidaklah instan.



Teori-teori tersebut perlu adanya reinterpretasi dan adaptasi pada kebudayaan yang berbeda, dan ini tentunya bukanlah perkara yang gampang. Pemimpin yang dicintai bawahannya di negeri ini, termasuk di lembaga pendidikan, ke depan diharapkan untuk membangun dan menyeimbangkan hubungan kosmis. Bawahan dan atasan “nyawiji” (menyatu) dalam tutur dan tingkah laku. Memang hal ini tidak mudah. Kadang dalam “nyawiji”, atasan dan bawahan ada domba-domba hitam yang membelenggu. Mereka bisa menjadi aktor protagonis ataupun antagonis.

Bangsa Indonesia sebenarnya memiliki konsepsi kepemimpinan yang adiluhung dan relevan dengan konteks budaya Indonesia. Konsepsi tersebut di antaranya yaitu Serat Satra Gendhing, Serat Jayalengkara, Serat Witaradya, tembang ilir-ilir dan Hasta Brata (Abimanyu, 2014).

Di antara falsafah ke-Jawa-an yang klasik dan bisa menyeimbangkan hubungan kosmis adalah sebuah manuskrip peninggalan masa lampau tentang kepemimpinan yang disebut Serat Sastra Gendhing. Manuskrip ini dikembangkan seorang Raja di tanah Jawa. Dijuluki Raden Mas Jatmika atau Raden Mas Rangsang. Beliau menjadi Raja keempat di Mataram. Bergelar Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo atau Senopati Ing Ngalaga Sayyidin Panatagama (1613-1645) (Abimanyu, 2014).

Manuskrip Serat Sastra Gendhing ini bermuatan falsafah kepemimpinan Jawa. Diterapkan Sultan Agung selama melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai raja di Kasultanan Mataram. Adapun secara komprehensif manuskrip ini berisi tujuh amanah utama (Achmad, 2013).

a. *Swadana Maharjeng Tursita*

Yaitu pemimpin harus memiliki intelektualitas tinggi, berilmu, jujur, pandai menjaga nama, serta mampu menjalin komunikasi dengan bijak dan baik kepada bawahan, berdasarkan prinsip-prinsip kemandirian. Dengan demikian, komunikasi pemimpin tidak akan mendapatkan intervensi dari pihak manapun, baik dari keluarga, kelompok maupun golongannya.

Implikasinya, pemimpin pendidikan harus mempunyai keahlian teknis, pemikiran yang rasional dan obyektif, berpikir sesuai fakta yang mendorong pemimpin untuk melihat kenyataan dan terus belajar untuk menambah pengetahuan. Pemimpin pendidikan harus memiliki minat yang besar, rasa ingin tahu dalam segala hal, memiliki rasa ingin tahu tentang orang lain dan motivasi yang mendasarinya, terbuka pada pengalaman baru, suka membaca dan suka akan tantangan (Mulyono, 2009).

b. *Bahni Bahna Amurbeng Jurit*

Yaitu pemimpin hendaklah senantiasa berada di depan untuk memberikan suri tauladan yang baik kepada bawahan dalam membela



keadilan dan kebenaran. Hal ini selaras dengan pendapat Ki Hajar Dewantara yang menyatakan, pemimpin harus di depan untuk memberi teladan yang baik (*ing ngarsa sung tuladha*). Seorang pemimpin yang sekadar pintar berkata-kata dan berretorika, tapi tidak bertindak konkret, bukanlah pemimpin sejati.

Implikasinya, pemimpin pendidikan merupakan orang yang akan dilihat oleh seluruh orang yang dipimpinnya, sehingga ia harus menjadi contoh, pembimbing bagi yang dipimpinnya. Dengan menjadi teladan yang baik dalam ucapan, tutur kata, maupun perbuatan, maka dia bisa merangsang para bawahan untuk bersikap seperti pemimpinnya (Makawimbang, 2012).

c. *Rukti Setya Garba Rukmi*

Yaitu pemimpin harus memiliki tekad bulat di dalam menghimpun segala potensi, demi kemakmuran serta keluhuran martabat bangsa. Tidak mudah ragu-ragu dan tidak mudah terpengaruh pihak lain di dalam menghimpun suatu potensi. Sebab itu, pemimpin harus memiliki sikap *yen wedi aja wani-wani, yen wani aja wedi-wedi* (kalau takut jangan sok berani; kalau berani jangan merasa takut).

Implikasinya, pemimpin pendidikan harus memiliki keberanian dalam menjalankan tugasnya. Antara lain berani untuk mengambil keputusan yang berisiko, berani menunjukkan dan tampil dengan prestasi dan prestise, berani menata dan mengelola institusi sesuai tujuan yang diharapkan, serta berani menjalankan tugas dengan amanah (Soetopo, 2010).

d. *Sripandayasih Krani*

Yaitu pemimpin harus memiliki tekad menjaga simbol-simbol kesucian agama, agar bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Hidup saling toleransi antar umat. Karena agama merupakan media membentuk karakter dan moral masyarakat yang ideal. Jika tidak mampu menjaganya, maka akan hancurlah sendi sendi moral, martabat, dan tidak beradab.

Implikasinya, pemimpin pendidikan harus memiliki sikap moderasi dalam beragama. Yaitu sikap yang tidak berlebih-lebihan. Artinya, seorang pemimpin harus memiliki sikap yang tidak ekstrem (otoriter) dan selalu mencari jalan terbaik yang mempersatukan dan mempersamakan semua elemen dalam menjalankan kepemimpinannya. Hal ini berarti pemimpin harus memberikan tauladan, perlindungan dan kesejahteraan, membawa kemajuan dan perubahan yang lebih baik bagi anggotanya.

e. *Gaugana Hasta*

Yaitu pemimpin harus memiliki kemampuan mengembangkan seni sastra untuk mengisi peradaban bangsa. Sebagaimana agama, jika tidak

mampu mengembangkan, maka sama dengan menghancurkan peradaban bangsa dan akan mengalami kehancuran secara perlahan-lahan.

“Pemimpin ini memang harus berjiwa seniman. Kalau pemimpin tidak punya jiwa seniman bagaimana mbangunnya, pasti mbangunnya berantakan” demikian yang dikatan oleh Dedi Mulyadi. Pemimpin adalah suatu seni, karena setiap pemimpin mempunyai caranya sendiri (Khoiriyah, 2017).

Tidak semua orang memiliki gaya kepemimpinan yang sama. Ada *Hard Leadership* (kepemimpinan keras) yang biasanya berkata-kata, “ikuti aku atau kamu pergi”. Ada pula *Soft Leadership* (kepemimpinan lembut) yang menganggap bahwa ini adalah sebuah tim. Saya bertanggung jawab dan saya selalu ada bersama kalian.

f. *Stiranggana Cita*

Yaitu pemimpin harus memiliki kemampuan mengembangkan budaya, pelopor ilmu pengetahuan dan membawa suara kedamaian pada masyarakat. Budaya dan ilmu merupakan rumah untuk membangun karakter, intelektualitas serta pandangan hidup masyarakat. Bila masyarakat memiliki karakter yang baik, intelektualitas yang tinggi serta pandangan hidup yang luas, maka negara akan mengalami kemajuan dan perkembangan signifikan.

Implikasinya, pemimpin pendidikan harus meningkatkan ilmu pengetahuan agar selalu kontekstual menghadapi zamannya. Segala sesuatu tindakan dan sikap pemimpin, harus didasari dengan ilmu pengetahuan dan fakta ilmiah. Selain itu, pemimpin pendidikan harus berbudaya. Yaitu memahami nilai-nilai adiluhung kearifan lokal dalam masyarakat, karena pemimpin adalah teladan bagi masyarakat dan orang yang dipimpinnya.

g. *Smara Bhumi Adi Manggala*

Yaitu pemimpin harus memiliki tekad mempertahankan persatuan dan menjadi pemersatu berbagai kepentingan yang berbeda-beda secara istiqamah, kontinyu; serta berperan dalam menciptakan ketenangan, perdamaian di dunia. Oleh sebab itu, seorang yang memiliki jiwa provokatif, memecah belah dan bertendensi merusak persatuan demi kepentingan politik, tidak ideal menjadi pemimpin.

Implikasinya, pemimpin pendidikan harus berperan sebagai perekat sosial (*social integrative factor*). Menyatukan orang-orang dan memaksa mereka untuk mengesampingkan perbedaan demi tujuan yang lebih besar. Pemimpin pendidikan harus mampu memahami harapan dan aspirasi, terutama ketakutan, dari berbagai konstituen. Pemimpin pendidikan juga harus memfasilitasi dialog dan mendorong perilaku yang memungkinkan mereka yang menganggap dirinya berbeda dari orang lain untuk melihat manfaat dari

gagasan dan keprihatinan orang lain, serta menjunjung tinggi prinsip dan menghindari sikap keberpihakan.

#### D. KESIMPULAN

Pendidikan di era sekarang menawarkan proses berfikir kritis, berkarakter dan berliterasi. Hal ini menjadi terdepan dalam mencetak pemimpin yang unggul di masa akan datang. Namun jika menilik masa lampau, maka ada elemen yang belum terakomodasi, yaitu pemimpin yang mampu bersikap harmoni dan menerima perbedaan kepentingan. Banyak pemimpin yang dalam konteks intelegensi sangat cerdas (*Swadana Maharjeng Tursita*), namun masih ada hambatan dalam konteks berbudaya dan pemersatu (*Stiranggana Cita dan Smara Bhumi Adi Manggala*).

Untuk mengikis hambatan ini, pemimpin dengan tingkat berpikir kritis dan berkarakter, perlu diberi kesempatan berkarya dengan kerja nyata melalui kecerdasan sosial-spiritual (*Bahni Bahna Amurbeng Jurit*). Tujuannya agar pemimpin lebih bersemangat untuk memberi tauladan yang baik, saling gotong-royong, dan asah-asih-asuh. Memang, semua itu perlu proses panjang. Akan tetapi, keterampilan sosial-spiritual ini di masa datang memberikan spirit bagi seorang pemimpin untuk membela kebenaran dan keadilan (*Rukti Setya Garba*).

Artikel ini menunjukkan bahwa falsafah Jawa dapat dijadikan pedoman hidup dalam konteks kepemimpinan pendidikan. Yaitu pemimpin yang bukan dipengaruhi, tetapi mempengaruhi; bukan keistimewaan, tetapi tanggung jawab; bukan fasilitas, tetapi pengorbanan; bukan leha-leha, tetapi kerja keras; bukan untuk dihormati, tetapi untuk mengabdikan; bukan kesewenang-wenangan dalam bertindak, tetapi kewenangan dalam melayani, mengambil keputusan dan menentukan langkah terbaik berdasarkan musyawarah dalam rangka mencapai tujuan bersama.

#### BIBLIOGRAFI

- Abimanyu, S. (2014). *Intisari Kitab-Kitab Adiluhung Jawa Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana.
- Achmad, S. W. (2013). *Falsafah Kepemimpinan Jawa: Dari Sultan Agung hingga Hamengkubuwana IX*. Yogyakarta: Araska.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Endraswara, S. (2013). *Falsafah Kepemimpinan Jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Febri, K. A. (2019). Falsafah Kepemimpinan Pendidikan (Hasta Brata sebagai Basis Kepemimpinan Pendidikan). *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 4(2), 194-

207.

- Hadi, S. (1990). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kartono, K. (2016). *Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu?* Jakarta: Rajawali Pers.
- Kathryn M. Bartol, D. C. (2002). *Management: A Pacific Rim Focus*. New York: McGraw-Hill.
- Khoiriyah, M. (2017, Juni 8). *Dedi Mulyadi: Setiap Pemimpin Harus Memiliki Jiwa Seni*. Retrieved from okezone.com:  
<https://celebrity.okezone.com/read/2017/06/08/33/1711292/dedi-mulyadi-setiap-pemimpin-harus-memiliki-jiwa-seni>
- Makawimbang, J. (2012). *Kepemimpinan Pendidikan yang Bermutu*. Bandung: Alfabeta.
- Mulyadi. (2010). *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya Mutu*. Malang: UIN Maliki Press.
- Mulyono. (2009). *Educational Leadership: Mewujudkan Efektifitas Kepemimpinan Pendidikan*. Malang: UIN-Malang Press.
- Santoso, I. B. (2010). *Nasihat Hidup Orang Jawa*. Yogyakarta: Diva Press.
- Soetopo, H. (2010). *Kepemimpinan Pendidikan*. Malang: FIP UM.
- Wehrich, H. K. (1996). *Manajemen*. Jakarta: Erlangga.